

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan dalam Implementasi undang-undang ini merupakan proses strategis yang menuntut kolaborasi, konsistensi kebijakan, serta pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Setiap satuan pendidikan ditantang untuk menerjemahkan aturan tersebut ke dalam praktik nyata, baik dalam pengelolaan institusi, pembelajaran, maupun pelayanan kepada peserta didik di kecamatan Babelan Dalam hal ini di Kecamatan Babelan sudah di jalankan dan dilakukan pada Tingkat Pendidikan Kecamatan Babelan kabupaten Bekas, peran yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang menandai bahwa , berdasarkan pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa: “Pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan jaminan tersedianya anggaran untuk terselenggaranya bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun. Sehingga wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”

Implementasi Pendidikan di kecamatan Babelan menurut teori George C. Edward III untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor dan masing-masing faktor tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi di dalamnya dan Berikut ini hasil simpulan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya Adapun indikator yang bisa dijadikan acuan

tolak ukur dalam menilai menurut George C. Edward III untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan sudah dilakukan hal tersebut di lihat dari hasil wawancara dari beberapa latar belakang yang berbeda antara lain Kepala korwil, Kepsek sd negeri, Komite sd negeri, kurikulum sdit dan komite sdit Keberhasilan dalam menerapkan implementasi mengacu pada George C. Edward III untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi

1. Peran Indikator komunikasi berdasarkan informasi yang diberikan kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babelan, Kepala Sekolah SDN Bahagia 05, komite SDN Bahagia 05, komite SDIT Attaqwa Pusat dan kurikulum SDIT Attaqwa Pusat di kecamatan Babelan dalam implementasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya
2. Peran Indikator komunikasi berdasarkan informasi yang diberikan kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babelan, Kepala Sekolah SDN Bahagia 05, komite SDN Bahagia 05, komite SDIT Attaqwa Pusat dan kurikulum SDIT Attaqwa Pusat di kecamatan Babelan dalam implementasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya
3. Peran Indikator disposisi berdasarkan informasi yang diberikan kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babelan, Kepala Sekolah SDN Bahagia 05, komite SDN Bahagia 05, komite SDIT Attaqwa Pusat dan kurikulum SDIT Attaqwa Pusat di kecamatan Babelan dalam implementasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya

4. Peran Indikator disposisi berdasarkan informasi yang diberikan kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babelan, Kepala Sekolah SDN Bahagia 05, komite SDN Bahagia 05, komite SDIT Attaqwa Pusat dan kurikulum SDIT Attaqwa Pusat di kecamatan Babelan dalam implementasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya
5. Peran Indikator struktur birokrasi berdasarkan informasi yang diberikan kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Babelan, Kepala Sekolah SDN Bahagia 05, komite SDN Bahagia 05, komite SDIT Attaqwa Pusat dan kurikulum SDIT Attaqwa Pusat di kecamatan Babelan dalam implementasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya
6. Adapun Hambatan pada implementasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan yaitu :
  1. Keterlambatan pelaporan administrasi sekolah karena jarak sekolah yang jauh dari kantor Korwil Disdik Kecamatan Babelan.
  2. Kurangnya pemahaman dan penerimaan orang tua terhadap perubahan kebijakan sekolah, seperti perubahan jam masuk dan kurikulum baru.
  3. Mindset guru yang masih menggunakan pola pikir tetap (fixed mindset) sehingga sulit beradaptasi dengan pembelajaran mendalam dan Kurikulum Merdeka.
  4. Kondisi fasilitas sekolah yang belum memadai, seperti halaman sekolah yang masih berdebu dan belum dipaving block.
  5. Jumlah siswa yang banyak sehingga membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang lebih komprehensif.
  6. Dihapuskannya koordinator kelas (korlas) sehingga penyampaian informasi antara sekolah, komite, dan wali murid menjadi kurang efektif.

7. Pergantian kurikulum yang sering terjadi akibat pergantian Menteri Pendidikan sehingga sekolah dan guru harus terus beradaptasi ulang.
  8. Ketidaksesuaian penerapan kurikulum nasional dengan kebutuhan sekolah, seperti penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS yang dianggap kurang efektif.
  9. Komunikasi antara guru dan wali murid yang kurang berjalan dengan baik.
  10. Kurangnya keterlibatan dan pengawasan orang tua terhadap proses pendidikan anak di rumah.
  11. Keterbatasan sarana dan kebutuhan fasilitas tambahan seiring meningkatnya jumlah siswa.
  12. Tantangan dalam menyamakan persepsi antara pihak sekolah dan orang tua terkait program atau kebijakan baru sekolah.
  13. Perkembangan teknologi dan tuntutan kurikulum yang mengharuskan guru dan staf terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan adaptasi.
7. Upaya untuk menghadapi Hambatan pada Peran dalam pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan yaitu :
1. Melakukan komunikasi yang intens dengan sekolah yang terlambat menyerahkan administrasi atau laporan.
  2. Kepala sekolah terus berinovasi dan bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan dan hambatan pendidikan.
  3. Mengadakan pelatihan pembelajaran mendalam dan pelatihan koding bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan pola pikir bertumbuh (growth mindset).
  4. Membentuk komunitas belajar (kombel) sebagai wadah berbagi ilmu dan pengembangan kemampuan guru antar jenjang kelas.
  5. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua setiap bulan untuk menyampaikan informasi terkait perubahan kebijakan sekolah dan kurikulum.

6. Menyampaikan informasi kepada orang tua melalui komunikasi langsung maupun media WhatsApp agar informasi lebih mudah diterima.
7. Mengupayakan penambahan fasilitas sekolah, seperti toilet dan sarana lainnya, melalui bantuan dinas terkait serta perawatan fasilitas yang sudah ada.
8. Menambah alat dan kebutuhan pembelajaran menggunakan dana BOS melalui belanja modal sekolah.
9. Menunjuk perwakilan kelas sebagai penghubung informasi antara sekolah dan wali murid meskipun tidak menggunakan istilah koordinator kelas.
10. Mengadakan sesi konsultasi parenting setiap hari Sabtu untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara guru dan wali murid.
11. Menghindari pembahasan perkembangan siswa melalui WhatsApp guna meminimalisasi miskomunikasi antara guru dan orang tua.
12. Mengedepankan pendekatan mencari solusi bersama daripada menyalahkan atau menghakimi wali murid maupun siswa.
13. Merumuskan kurikulum khas sekolah agar tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kurikulum nasional yang sering berganti.
14. Tetap memisahkan mata pelajaran IPA dan IPS karena dianggap lebih efektif dibandingkan penggabungan menjadi IPAS.
15. Mengadakan rapat atau musyawarah bersama antara sekolah, komite, dan orang tua untuk membahas hambatan yang muncul.
16. Komite sekolah membantu mencari solusi terhadap hambatan fasilitas dan kebutuhan sekolah melalui dukungan orang tua maupun koordinasi dengan yayasan.
17. Mendukung evaluasi dan perbaikan bersama terhadap hambatan akademik maupun kebijakan sekolah.
18. Menjaga sinergi dan kerja sama antara sekolah, komite, dan orang tua agar proses pendidikan tetap berjalan kondusif

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai implementasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan terdapat beberapa saran yang penulis rasa dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan Babelan yaitu

1. Sekolah perlu memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua melalui sosialisasi rutin, forum diskusi, serta pendampingan parenting agar tercipta kesamaan persepsi mengenai kebijakan sekolah, perubahan kurikulum, dan perkembangan peserta didik. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan terarah, orang tua tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga menjadi mitra aktif sekolah dalam mendukung proses pendidikan anak baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.
2. Peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, komunitas belajar, serta pendampingan terkait pembelajaran inovatif dan perkembangan teknologi pendidikan. Upaya ini penting untuk membentuk pola pikir bertumbuh (*growth mindset*) pada guru sehingga mereka lebih siap menghadapi perubahan kurikulum, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik secara optimal.
3. Sekolah dan pihak terkait perlu terus mengembangkan sarana prasarana serta sistem pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan adaptif. Penambahan fasilitas belajar, perbaikan lingkungan sekolah, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pembelajaran dapat membantu menciptakan proses pendidikan yang lebih nyaman, tertata, dan efisien. Selain itu, kerja sama yang baik antara sekolah, komite, orang tua, dan dinas pendidikan juga perlu terus ditingkatkan agar setiap hambatan dapat diselesaikan secara bersama-sama dan berkelanjutan.